



**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN *GOOD GOVERNANCE*  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh**

**KIKI VERONICA AGATHA**

**NPM. 21601082123**





**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**MALANG**

**2020**

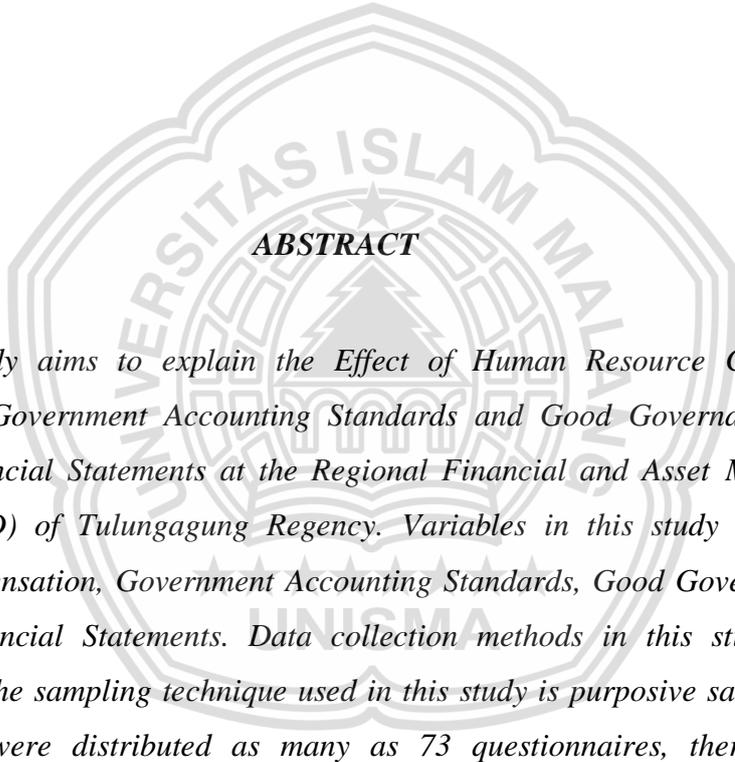




## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Indikator Variabel yang ada dalam penelitian ini Kompensasi Sumberdaya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance* dan Kualitas Laporan Keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Kuesioner yang disebar sebanyak 73 kuesioner, tidak terdapat kuesioner yang tidak kembali, kuesioner yang kembali sebanyak 73 dan jumlah kuesioner yang tidak sesuai kriteria 21 sehingga kuesioner yang dapat diolah berjumlah 52 kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas Kompensasi Sumberdaya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance* berpengaruh positif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan.

Kata Kunci : **Kompensasi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan.**



### ABSTRACT

*This study aims to explain the Effect of Human Resource Competence, Application of Government Accounting Standards and Good Governance on the Quality of Financial Statements at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tulungagung Regency. Variables in this study are Human Resource Compensation, Government Accounting Standards, Good Governance and Quality of Financial Statements. Data collection methods in this study used a questionnaire. The sampling technique used in this study is purposive sampling. The questionnaires were distributed as many as 73 questionnaires, there were no questionnaires that did not return, as many as 73 returned questionnaires and the number of questionnaires that did not fit the criteria 21 so that the questionnaires that could be processed amounted to 52 questionnaires. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the independent variable Human Resource Compensation, Government Accounting Standards, Good Governance has a positive effect on the variable quality of financial statements.*

**Keywords:** *Human Resource Compensation, Government Accounting Standards, Good Governance, Quality of Financial Statements.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004:43). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Pemerintahan daerah sebagai sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen (Mardiasmo, 2009:125). Sektor publik merupakan organisasi entitas ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai pengendali masyarakat menuju kesejahteraan. Kendali tersebut berupa penyediaan layanan yang bermanfaat untuk publik. Sektor publik sering diartikan sebagai organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik, tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, karena tuntutan akuntabilitas publik yang semakin meningkat untuk terwujudnya *Good*

*Governance*. Hal ini di atur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambanya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami.

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut setidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan di masa yang akan datang. Laporan keuangan berkualitas dapat dilihat dari opini dari Badan Pemeriksa Keuangan, ada strata penilaian laporan keuangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan yang menyangkut posisi keuangan, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan juga harus memiliki kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah yaitu dapat dipahami, relevan keandalan dan dapat diperbandingkan (IAI, 2002:12).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan APBD kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas kepada publik. Pemerintah tidak hanya mempertanggungjawabkan uang yang dipungut dari rakyat, tapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas hasil-hasil yang dicapainya, dengan prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan berdasarkan undang-undang (Korry, 2018).

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Menurut Bastian (2006) bahwa penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah mereka yang menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Betapapun bagusnya SAP, tanpa didukung SDM yang handal, maka laporan keuangan yang berkualitas sulit dicapai. Marwansyah (2012:244) mendefinisikan sumber daya manusia yang kompeten adalah sumber

utama keunggulan organisasi dalam menjalankan aktivitas penyediaan barang atau jasa berkualitas tinggi dalam hidupnya.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2002: 146), sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Semakin cepat laporan keuangan disajikan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan.

Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Adhi dan Suhardjo, 2013). Penerapan SAP harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Apabila informasi pada laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adanya upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serata cita-cita bangsa dan Negara. Berbagai peraturan dan perundangundangan tentang pengelolaan

keuangan telah disusun guna dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *Good Governance* dan *Clean Government* (Azlim, dkk, 2012).

Hasil penelitian dari Azlim dkk (2012) bahwa pelaksanaan *Good Governance* harus dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung?

3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung ?
4. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung ?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi Pemerintah
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi

pemerintahan dan *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *Good Governance*.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi rujukan perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk penelitian yang serupa.

## 3. Bagi Bidang Akademik

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus menentukan solusi atas masalah di masa depan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *Good Governance* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial *Good Governance* berpengaruh terhadap berpengaruh positif dan signifikan kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.

## 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga penulis tidak mengawasi secara langsung atas pengisian jawaban tersebut. Kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu masing-masing responden.
2. Faktor pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terbatas pada kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan *Good Governance* sehingga cakupannya kurang luas untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Obyek penelitian hanya terbatas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, sehingga hasil penelitian tidak dapat di generalisasikan.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menerapkan metode survei melalui kuesioner dengan ditambahkan teknik wawancara secara langsung, agar data dari responden akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Kualitas Laporan Keuangan, misalnya Sistem Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Peran Internal Audit dll.



3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian seperti di BPKAD yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adhi dan Suhardjo 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 3(3).
- Azlim, dkk. 2012. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. ISSN 2302-0164, Volume 1, No. 1. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Billah, MM. 2001. *Good Governace dan Kontrol Sosial*. Jakarta : Jurnal Prisma.
- Chan, James L. 2003. *Government Accounting: An Assessment of Theory, Purposes and Standards. Public Money And Management January 2003*.
- Dharma, Agus. 2004. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Elfauzi, and S. Sudarno. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Demak). *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 8, no. 2, Nov. 2019.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, Hani. 2006. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, edisi kedua, Yogyakarta.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha, 2008, *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hapsari, Alim dan Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi Makassar*, 2007.
- Hartono. 2004. *Statistik untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Ihya'ul Ulum, 2004, Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik , UMM Press: Malang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat.
- Jannaini, Yuli. 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei pada Dinas Kota Bandung). Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Kuncoro, Mudjarat. 2005. Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Erlangga. Jakarta.
- Kooiman, Jan (ed), 1993, Modern Governance: New Government Society Interactions, London: Sage Publications.
- Marwansyah. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:Alfabeta.
- Mardiasmo. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mustopadidjaya, AR 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi,Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta:LAN
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Priyono, Agus. 2015. Analisis Data Dengan Spss. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Priyono, Agus. 2016. Analisis Data Dengan Spss. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, Singgih. 2016. Statistik Parametrik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance Dan Good Corporate* Bagian Ke Tiga, , Mandar Maju, Bandung.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Legalitas.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta:Legalitas.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme . -Jakarta, 1999.
- Veitzal. Rivai, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Wati, Kadek Desiana. 2014. Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 2(1)
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.
- Wulandari, Mayang. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). 6(3)
- Yaqin, Addinul. 2018. Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah : Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. 2(1)